

**Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis *Social Capital*
Pada Era Otonomi Desa
(Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang)**

Mochammad Rozikin

Universitas Brawijaya Malang
Email: mail.rozikin@yahoo.com

ABSTRACT

The 1997 reforms brought changes in regional governance from a centralized model to decentralization. The village autonomy Law number 6 year 2014 was showed a new era where the existence of villages was appreciated as the smallest unit of government system in Indonesia, with all its diversity as local wisdom to strengthened community resilience nationally starting from the village.

This study used descriptive qualitative method, with the analysis step according to Bogdan and Biklen (1982), carried out 2 (two), namely the first stage of data analysis during the field and second analysis of data after collected. The research location of Pandansari village, Ngantang District, Malang Regency, was affected by the Mount Kelud eruption which affected the resilience of rural communities. Data was taken by interview techniques, observations and supporting documents.

The results of the study showed that after the impact of the Mount Kelud disaster the resilience of the community was quite disturbed, but it could return to normal with the efforts to developed resilience of rural communities by integrating social capital that existed in the community. Thus, Social capital that developed in the community contributed to developed community resilience after natural disasters.

Keywords: National Resilience, Social Capital, Village Autonomy.

ABSTRAK

Reformasi tahun 1997 membawa perubahan tatakelola pemerintahan daerah dari model sentralisasi kepada desentralisasi. Kemudian dalam otonomi desa terbit Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Hal ini menunjukkan era baru dimana keberadaan desa diapresiasi sebagai unit terkecil system pemerintahan di Indonesia, dengan segala keragamannya sebagai kearifan lokal, untuk memperkuat ketahanan masyarakat secara nasional yang dimulai dari desa.

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, dengan langkah analisis menurut Bogdan dan Biklen (1982), dilakukan 2 (dua) yaitu tahap pertama analisis data selama di lapangan dan kedua analisis data setelah terkumpul. Lokasi penelitian Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang terkena dampak bencana letusan Gunung Kelud yang berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat desa. Data diambil dengan teknik wawancara, observasi dan dokumen pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan pasca dampak bencana Gunung Kelud ketahanan masyarakat cukup terganggu, tetapi dapat kembali normal dengan adanya upaya pengembangan ketahanan masyarakat desa dengan mengintegrasikan modal sosial (*social capital*) yang ada pada masyarakat. Modal sosial yang berkembang pada masyarakat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ketahanan masyarakat pasca bencana alam.

Kata Kunci: Ketahanan Masyarakat, Social Capital, Otonomi Desa.

PENGANTAR

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan dalam menempatkan desa. Pada era Orde Baru dengan model pemerintahan sentralistik dimana keberadaan desa diseragamkan tanpa menghargai perbedaan kondisi, potensi dan sejarah adanya masyarakat desa dengan pemerintahannya. Sedangkan era otonomi daerah sekarang ini, diberlakukan otonomi desa yakni desa mempunyai kapasitas kewenangan mengatur dan mengurus masyarakatnya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Dengan potensi yang dimiliki oleh setiap desa maka diharapkan pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraannya secara otonom sebagai buah dari desentralisasi pemerintahan dan program pembangunan desa.

Sejarah pemerintahan desa telah mencatat bagaimana peranan desa yang terdiri dari kesatuan masyarakat tertentu dengan batas-batas daerahnya mampu memberikan andil dalam mempermudah tatakelola berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Dalam dinamika perjalanan masyarakat desa maka tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat desa ini merupakan organisasi ketatanegaraan sekalipun terkecil dan paling sederhana dalam suatu negara yang di dalamnya memiliki nilai-nilai kearifan lokal masyarakat termasuk pula bermacam bentuk dan corak kesatuan-kesatuan, suatu masyarakat hukum yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Nilai-nilai kearifan lokal yang melekat pada masyarakat desa ini merupakan modal dasar untuk membangun desa, termasuk dalam membangun ketahanan masyarakat desa yang tentunya menopang Ketahanan Nasional Negara Indonesia (Lemhannas, 1997).

Menurut Budiono (2000), desa merupakan institusi mandiri dan otonom yang kaya dengan tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Kondisi seperti ini berkembang sejalan dengan sejarah desa yang sejak dulu diperkenankan untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan desanya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, membangun dari desa merupakan sebuah upaya yang baik dalam pembangunan kedepan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, jika dibandingkan jumlah desa dan kota. Namun, belakangan ini dari desa yang terlupakan dan belum mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah saat ini desa sudah mulai diperhatikan khususnya dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Proses pembangunan masyarakat desa ini merupakan suatu upaya dalam penguatan ketahanan masyarakat desa yang merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa melalui berbagai bentuk pengembangan lokal sesuai dengan potensi wilayahnya. Dengan memperkuat ketahanan masyarakat desa, jelas kemakmuran desa akan mengalir dan mendorong kota tumbuh lebih baik dan sehat. Pengaturan tentang desa terdapat dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan di desa. Segala potensi di desa juga dapat lebih diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam perkembangan negara modern yang dijalankan oleh sistem tata kelola *good governance* dimana dalam penyelenggaraan system pemerintahan tidak lagi monopoli pemerintah (*government*) tetapi adanya *sharing* dengan stakeholder lainnya (*governance*) yakni pihak swasta (*privat*)

dan masyarakat (*society*). Oleh karena itu model sentralisasi yang dipraktekkan selama orde baru tidak lagi relevan dengan tuntutan dinamika politik pemerintahan, baik local, nasional maupun global. Dengan adanya otonomi desa maka diharapkan peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat desa membangun desanya. Otonomi desa mengapresiasi keragaman budaya yang berkembang turun temurun di masyarakat desa. Hal ini berarti sumberdaya lokal yang memberikan kontribusi untuk kemandirian desa, yang pada akhirnya berkontribusi dalam ketahanan bangsa secara keseluruhan.

Pada era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat menjadikan masyarakat sangat terbuka dengan informasi, sehingga pada satu sisi positif untuk mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mendorong perubahan (pembangunan) lebih baik dan berkemajuan, tetapi pada sisi lain berdampak negatif apabila masyarakat desa tidak selektif dalam menerima informasi dengan berbagai muatan nilai yang bertentangan atau tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dijelaskan oleh Wahana (2015:16) bahwa dewasa ini keluarga Indonesia menghadapi tantangan seiring masuknya nilai-nilai baru atau nilai budaya global yang seringkali bertentangan dengan nilai budaya bangsa. Dalam kondisi ini maka ketahanan dan bahkan kelangsungan hidup budaya nasional sangat tergantung dari ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dari suatu bangsa dalam menghadapi arus penetrasi budaya global tersebut. Setiap individu atau pribadi dalam suatu keluarga Indonesia saat ini sedang menghadapi konflik antara *Das Sein* (apa yang senyatanya terjadi atau realita) dan *Das Sollen* (apa yang seharusnya terjadi atau yang diharapkan) dalam memahami nilai

budaya nasional yang akan berakibat pada melemahnya ketahanan individu sebagai benteng dalam menghadapi nilai budaya global.

Apabila proses pendangkalan nilai-nilai Pancasila yang diakibatkan oleh arus informasi yang tidak terseleksi maka sangat dimungkinkan bangsa Indonesia akan kehilangan identitasnya, dan bangsa yang kehilangan identitas akan kehilangan eksistensinya. Identitas bangsa dibangun dalam waktu yang sangat lama sesuai dengan perjalanan sejarah bangsa tersebut, kebudayaan bangsa tersebut ikut membentuk identitas bangsa. Oleh karena itu menjadi strategis ketahanan bangsa ditopang oleh ketahanan budaya bangsa, dan ketahanan budaya dikuatkan oleh nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat yaitu modal social (*social capital*).

Otonomi desa tidak dimaksudkan membentuk masyarakat baru yang kehilangan identitas diri sebagai masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, berkehidupan guyup rukun, gotong royong, peduli terhadap sesama, saling tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran, saling menguatkan sebagai saudara berbangsa-bernegara, serta patriot membela bangsanya dari segala bentuk ancaman keamanan negara. Sehingga ketahanan bangsa yang dibangun dari nilai-nilai mulia yang berkembang pada masyarakat desa otonom merupakan kekayaan yang tidak boleh dianggap kecil kontribusinya dalam membangun ketahanan bangsa secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran modal sosial dalam memperkuat ketahanan masyarakat era otonomi desa. Desa lokasi penelitian pada Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, sebab desa ini berdampak

bencana akibat letusan Gunung Kelud yang berpengaruh terhadap terganggunya ketahanan emosi, sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi kemudian cepat pulih dengan upaya mengembangkan desa tangguh bencana, ketahanan masyarakat telah teruji.

Didasarkan pada cakupan dan realitas yang dikaji dalam perspektif Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis *Social Capital* Pada Era Otonomi Desa yang cenderung dapat didekati secara fenomenologi, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana fokusnya berkaitan dengan modal sosial yang diintegrasikan dalam pengembangan ketahanan masyarakat desa era otonomi, meliputi : ketahanan politik desa (demokrasi) dan ketahanan sosial-ekonomi desa. Kedua ketahanan ini seringkali menjadi sebab utama distabilitas terhadap ketahanan masyarakat, baik dalam lokal maupun nasional.

Data kualitatif dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai studi yang dipelajari. Data tersebut berisi data-data tertentu yang membentuk dasar analisis (Bogdan & Bilken, 1982). Data primer penelitian diperoleh dari wawancara mendalam kepada informan kunci dan observasi lapangan beberapa kali untuk triangulasi data serta terdukung foto, dokumen resmi dan artikel. Informan penelitian ini adalah : Kepala Desa, Ketua BPD, Modin (Bagian Keagamaan), Anggota PKK, Ketua Karangtaruna, dan LSM. Sedangkan analisis data penelitian dilakukan dengan dua tahap yaitu pada tahap pertama analisis data selama di lapangan dan kedua analisis data setelah terkumpul (Bogdan dan Biklen, 1982). Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu menurut, yaitu ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan

(*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

PEMBAHASAN

Kabupaten Malang merupakan wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah 3.530,65 km² terletak pada 112°17'10,90`` sampai 112°57'00`` Bujur Timur, 7°44'55,11`` sampai 8°26'35,45`` Lintang Selatan. Dengan luas wilayah tersebut, Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa yang dihuni oleh sekitar 3.000.000 jiwa. Hal ini berarti bahwa besar kepadatan penduduk di Kabupaten Malang adalah sebesar 875 jiwa/km². Jumlah penduduk Kabupaten Malang ini setara dengan negara Singapura (4.425.720 jiwa), Irlandia (4.015.676 jiwa), dan Uni Emirat Arab (2.563.212 jiwa). Tentu saja dengan wilayah geografis berbeda-beda di tiap kecamatan dan desanya, jumlah penduduk dan dinamikanya berbeda di setiap tempat. Kecamatan atau desa yang berada di wilayah dengan sumberdaya alam dan kondisi lingkungan yang mendukung tata perkonomian dan social kemasyarakatan, dimana tentu berkontribusi untuk terciptanya dinamika ketahanan masyarakat (Rahman, 2019)

Dilihat dari topografinya, Kabupaten Malang terdiri dari pegunungan dan gunung-gunung. Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungai irigasi pertanian. Beberapa gunung yang termasuk ke dalam Kabupaten Malang dan dikenal secara nasional yaitu Gunung Semeru (3.676 meter) merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Kelud

(1.731 meter), Gunung Welirang (3156 meter) dan Gunung Arjuno (3.339 meter), dan masih banyak banyak lagi gunung-gunung yang belum diakui oleh nasional.

Salah satu dari 378 desa di Kabupaten Malang adalah Desa Pandansari yang terletak pada lereng Gunung Kelud yang dikelilingi hutan dan ada danau buatan waduk PLTA Selorejo. Dalam sejarah terbentuknya Desa Pandansari berdiri tahun 1400an dikatakan bahwa babat desa yang semula berupa hutan di lereng Gunung Kelud diawali dengan adanya Dusun Plumbang, yang dalam berkembang selanjutnya berdiri dusun-dusun lainnya (sampai sekarang menjadi 7 dusun) yaitu Dusun Wonorejo, Dusun Klangon, Dusun Munjung, Dusun Sambirejo, Dusun Bales, dan Dusun Sedawun, dengan segala perkembangan kearifan lokalnya.

Nama Desa Pandansari berasal dari kata Pandan (pohon pandan) yang biasa di buat tikar, dan sari (sama dengan uang) yang berasal dari hasil penjualan tikar tersebut. Desa Pandansari terletak di wilayah administrasi Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Secara Geografis, Desa Pandansari termasuk dalam bagian Malang Barat yang berbatasan langsung dengan Waduk Selorejo, Desa Banturejo, Desa Kaumrejo dan Desa Pondokagung. Selain itu, Desa Pandansari menjadi lokasi PLTA dan Perhutani.

Desa Pandansari terdiri dari 7 dusun dengan 24 RT yaitu Dusun Plumbang yang terdiri dari 7 RT (RT 1 sampai RT 7), Dusun Bales yang terdiri dari 2 RT (RT 8 dan RT 9), Dusun Munjung yang terdiri dari 2 RT (RT 10 dan RT 11), Dusun Sambirejo (Kutut) yang terdiri dari 4 RT (RT 12 sampai RT 15), Dusun Wonorejo (Pait) yang terdiri dari 3 RT (RT 16 sampai RT 18), Dusun Klangon yang terdiri dari 2 RT (RT 19 dan RT 20), dan Dusun

Sedawun yang terdiri dari 4 RT (RT 21 sampai RT 24). Yang mana letak dari ke-7 dusun tersebut berjauhan karena terpisahkan dengan adanya 2 sungai yaitu Sungai Sambong (aliran lahar dingin Gunung Kelud) yang memisahkan wilayah Dusun Plumbang dan 3 dusun lainnya yaitu Dusun Munjung, Dusun Sambirejo (Kutut) dan Dusun Wonorejo (Pait). Dan Sungai Kunto yang membelah wilayah Dusun Munjung, Dusun Sambirejo (Kutu), Dusun Wonorejo (Pait) dengan Dusun Klangon dan Dusun Sedawun (Gambar 1).

Dengan letak wilayah yang berdekatan dengan Lereng Gunung Kelud menjadi Desa Pandansari memiliki matapecaharian yang mayoritas sebagai buruh tani, peternak, dan penambang pasir dan batu. Penduduk Desa Pandansari memiliki karakter dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dari ke-7 dusun tersebut, Dusun Plumbang merupakan dusun yang paling maju dari segi pendidikan dan sejahtera ekonominya, dikarenakan letak Dusun Plumbang yang paling mudah dijangkau dari wilayah luar.

Luas wilayah desa 1,103,425 Ha, terdiri dari 1.550 Kepala Keluarga, dengan jumlah penduduk keseluruhan 4.930 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 2.427 jiwa dan perempuan 2.503 jiwa dengan (KK). Latar belakang Pendidikan masyarakat adalah: Tidak Sekolah: 150 Jiwa; TK : 215 Jiwa; SD : 695 Jiwa; SLTP: 252 jiwa; SLTA: 126 jiwa; dan sarjana: 18 jiwa. Sedangkan pekerjaan penduduknya bervariasi yaitu: Pegawai Negeri: 10 Orang; Pegawai Swasta: 63 Orang; Petani: 793 Orang; Peternak: 678 Orang; Buruh Tani: 820 Orang; dan Wiraswasta: 69 Orang.

Desa Pandansari di lewati 5 buah sungai yaitu Sungai Sambong, yang mengalir di sepanjang wilayah desa dari timur ke barat,

Gambar 1
Peta Wilayah Desa Pandansari



Sumber: Monografi Desa Pandansari, 2018

sementara itu 4 sungai lainnya yaitu Sungai Konto, Sungai Namba'an, Sungai Nogo dan Sungai Lembung yang mengalir di sepanjang wilayah desa timur ke barat, air sungai air hujan digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti kebutuhan air minum, memasak, mencuci dan mandi. Desa Pandansari memiliki sumber mata air sebanyak 12 buah atau tandon sumber air yang terletak menyebar di seluruh Dusun Plumbang, Dusun Bales, Dusun Munjung, Dusun Samberejo Dusun Wonorejo masing-masing 1 buah, Dusun Klangon 4 buah dan Dusun Sedawun sebanyak 2 buah.

Pada tahun 2014, Desa Pandansari terkena dampak erupsi Gunung Kelud, berupa banjir lahar dingin yang merusak hampir seluruh infrastruktur desa, baik infrastruktur perhubungan, ekonomi, social-budaya, lingkungan tempat tinggal penduduk, lahan pertanian dan ternak yang diusahakan masyarakat. Kejadian ini sebagaimana

terjadi di berbagai tempat lainnya di wilayah Indonesia, sebab Indonesia memang berpotensi bencananya sangat tinggi. Bencana alam yang terjadi merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia serta terjadinya peristiwa yang tidak bisa dipastikan (secara tiba-tiba dan kurun waktu yang tidak bisa ditentukan). Rangkaian peristiwa tersebut disebabkan oleh alam atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mana menimbulkan kerugian baik kerugian berupa korban jiwa manusia, kerugian berupa kerusakan lingkungan, kerugian berupa harta benda dan dampak psikologis.

Wilayah yang memiliki tingkat resiko bencana cukup tinggi adalah Kabupaten Malang. Potensi bencana ini terdukung dengan adanya gunung berapi (Semeru, Bromo, Arjuna, Kelud) yang sewaktu-waktu erupsi, dan punya pantai yang sangat berpotensi gempa

dan tsunami. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Indra (staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan) bahwa:

“Kabupaten Malang sebagai salah satu dari daerah di Jawa Timur tergolong mempunyai potensi bencana sangat tinggi, baik ancaman bencana gunung berapi yang ada empat gunung aktif yaitu Gunung Semeru, Bromo, Arjuna dan Kelud. Juga tidak jarang kebakaran hutan, longsor, banjir, angin puting beliung, tsunami maupun bencana sosial. Adapun bencana yang sering terjadi di Kabupaten Malang adalah banjir, cuaca ekstrim, longsor, angin puting beliung dan gempa serta kebakaran hutan.” (Wawancara, 23 Januari 2019)

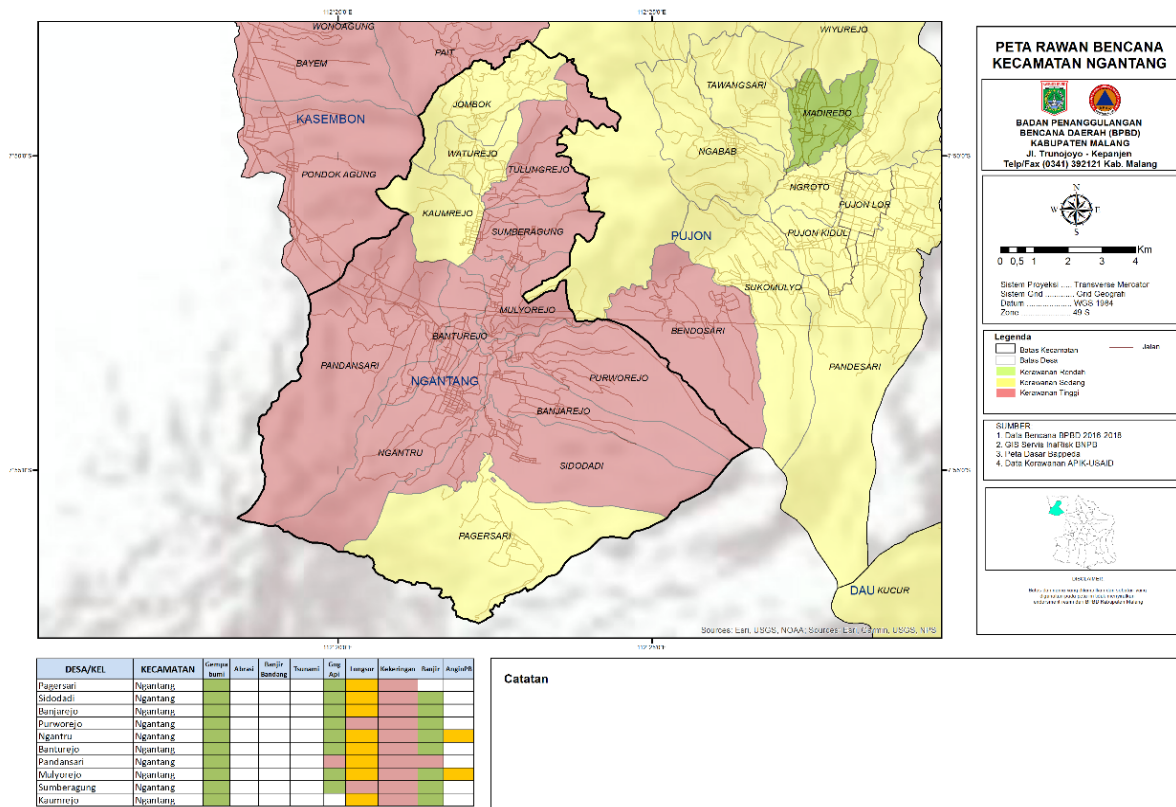
Wilayah Kabupaten Malang memiliki potensi tinggi rawan terjadi bencana alam

seperti banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, angin puting beliung dan gempa bumi. Selain bencana yang telah disebutkan, Kabupaten Malang juga memiliki potensi terjadi bencana Gunung Meletus dan salah satu wilayah yang memiliki potensi terjadinya gunung meletus adalah Kecamatan Ngantang memiliki potensi terjadinya bencana letusan Gunung Kelud (gambar 2).

Kondisi ketahanan masyarakat Desa Pandansari secara umum sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Pandansari Ibu Sitin, bahwa:

“Di desa kami tergolong bebas dari pencurian, pertengkaran warga, perselisihan atau sengketa berkepanjangan, protes warga terhadap pelayanan perangkat desa, maupun di lahan pertaniannya. Pokoknya

Gambar 2
Peta Wilayah Desa Pandansari



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, 2018

guyup rukun dan gotong royong dalam praktek kemasyarakatan. Namun demikian, keadaan ketahanan masyarakat desa agak berubah (goyah) sedikit saat terjadi erupsi Gunung Kelud tahun 2014 dimana desa kami terdampak lahar dingin erupsi Gunung Kelud. Masyarakat sangat kaget (sok) sebab tidak pernah menyangka desanya mendapatkan bencana lahar dingin Gunung Kelud. Banyak stakeholder yang bahu membahu meringankan beban penderitaan masyarakat, baik pemerintah, swasta, LSM, dan kelompok masyarakat dari berbagai daerah.” (Wawancara, 25 Januari 2019)

Juga ditegaskan oleh Ketua BPD Bapak Sarto mengatakan bahwa:

“Saya ini tergolong penduduk usia lanjut di Desa Pandansari, dan masyarakat yang tua tergolong masih banyak. Setahu saya sebagai penduduk asli Pandansari, masyarakat Pandansari ini guyup rukun, sekiranya ada permasalahan maka diselesaikan dengan musyawarah di masyarakat desa. Dan BPD difungsikan untuk tempat menampung aspirasi masyarakat terhadap banyak permasalahan, baik permasalahan pemerintahan desa maupun masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Kita sama tahu bahwa jika permasalahan tidak segera diatasi maka akan merembet ke masalah lainnya, dan rawan muncul pertentangan (konflik) di masyarakat. Nilai-nilai kebiasaan turun-temurun dipegangi oleh masyarakat desa dalam praktek kemasyarakatannya, baik dalam hubungan dengan pemerintah desa maupun antar warga masyarakat. Banyak organisasi di masyarakat desa yang dapat dimanfaatkan untuk membina kerukunan masyarakat, seperti PKK, Karangtaruna, Tahlilan, Kesenian jaran kepang, paguyuban peduli lingkungan, Gapoktan. Dengan saya menekankan bahwa banyak nilai-nilai yang diwariskan dari para orang tua masih dilestarikan sebagai perekat kekeluargaan di desa. Tetapi saat terjadi erupsi Gunung Kelud, masyarakat sangat terkejut, tidak pernah memperkirakan. Kemudian dalam

perkembangan beberapa hari setelah terdampak bencana, di masyarakat muncul galau, sedih, bahkan menganggap distribusi bantuan tidak merata. Muncul rasa curiga kepada petugas-petugas posko yang ada, tetapi Alhamdulillah anggapan itu cepat bisa teratasi melalui pendekatan kelompok yang ada di masyarakat. Tidak bisa dibayangkan apabila ketidakpercayaan yang dipicu dari perlakuan rasa tidak adil berkembang berkepanjangan, dan tentu awal bencana sosial yang menggoyahkan ketahanan masyarakat.” (Wawancara, 27 Januari 2019)

Dari penjelasan Ibu Kades dan Ketua BPD tersebut dapat ditarik benang merah bahwa ketahanan masyarakat mengalami dinamika (goyah) saat menerima kejadian yang tidak terduga, yakni berupa bencana alam, erupsi Gunung Kelud. Masyarakat umum memahami bahwa apabila terjadi bencana maka berdampak pada adanya korban, baik korban jiwa maupun korban harta benda, termasuk rusak dan tidak berfungsinya infrastruktur. Untuk mengembalikan ketahanan masyarakat agar tidak terus menerus dalam kesusahan, ketakutan dan terasing maka bantuan, pertolongan dengan model gotong royong masyarakat desa dilakukan oleh berbagai stakeholder yang terpanggil sebagai rasa/nilai kemanusiaan.

Terlebih desa-desa wilayah Kabupaten Malang rawan terkena bencana. Potensi bencana ini terdukung dengan adanya gunung berapi (Semeru, Bromo, Arjuna, Kelud) yang sewaktu-waktu erupsi, dan punya pantai yang sangat berpotensi gempa dan tsunami. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Indra (staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan) bahwa:

“Kabupaten Malang sebagai salah satu dari daerah di Jawa Timur tergolong

mempunyai potensi bencana sangat tinggi, baik ancaman bencana gunung berapi yang ada empat gunung aktif yaitu Gunung Semeru, Bromo, Arjuna dan Kelud. Juga tidak jarang kebakaran hutan, longsor, banjir, angin puting beliung, tsunami maupun bencana social. Adapun bencana yang sering terjadi di Kabupaten Malang adalah banjir, cuaca ekstrim, longsor, angin puting beliung dan gempa serta kebakaran hutan.” (Wawancara, 23 Januari 2019)

Hampir semua pihak meyakini bahwa masyarakat terdampak bencana akan terpengaruhi psikologisnya, maupun kehidupan normal yang berjalan selama ini sebelum terjadinya bencana. Pengalaman di berbagai daerah kejadian bencana sangat rentan goyahnya ketahanan masyarakat, terutama katahanan ekonomi, social dan psikologi. Ketahanan masyarakat (desa) merupakan bagian inti dalam membangun ketahanan nasional.

Kepala Desa Pandansari, Ibu Sitin mengungkapkan bahwa:

“Saya sebagai kepala desa sangat berharap masyarakat tanggap terhadap bencana, sebab desa kami ini rawan terhadap masalah bencana. Oleh karena itu atas saran BPBD kami membuat kajian risiko bencana pada desa Pandansari ini. Pengalaman kami menghadapi erupsi Kelud tahun 2014 menjadikan kami harus bersiaga, dan dari hasil kajian desa kami terdapat empat ancaman bencana yakni a) Erupsi Gunung Api tergolong tinggi, b) Banjir Lahar dan Hujan tergolong sedang dan c) Tanah Longsor tergolong rendah. Dari situlah kemudian desa kami dijadikan sebagai desa pengembangan Destana (desa tangguh bencana) oleh BPBD. Kegiatan yang dilakukan cukup banyak dan sering, baik kegiatan di klas maupun di lapangan. Di antaranya adalah sumulasi penganan korban pada saat awal terjadinya bencana. Juga membuat jalur evakuasi. Di samping itu banyak pihak yang

terlibat, baik BPBD sendiri maupun dinas terkait, pihak kepolisian, TNI, Kampus, Ormas, dan perusahaan seperti PT PJB dan Samporna. Yang kami ketahui hasilnya masyarakat meningkat pengetahuan dan kepedulian terhadap masalah bencana ini, dan tentunya akan menjadi modal kuat dalam menghadapi bencana. Namun demikian, kami berharap tidak terjadi bencana lagi di desa kami Pandansari ini. Sebab dengan bencana masyarakat depresi berat, stress, hilang kepercayaan diri disebabkan oleh kehilangan keluarga dan harta benda. Sehingga diperlukan penanganan untuk mengembalikan posisi normal, dan ternyata modal sosial mempunyai peran penting dalam pemulihan kondisi pasca bencana.” (Wawancara, 28 Januari 2019).

Ketahanan Masyarakat Desa

Pembahasan tentang ketahanan masyarakat Desa Pandansari terbagi ke dalam ketahanan politik (demokrasi) dan ketahanan sosial ekonomi. Secara lebih rinci kedua ketahanan masyarakat Desa Pandansari tersebut diuraikan sebagai berikut.

Ketahanan Politik (demokrasi).

Masyarakat desa mempunyai demokrasi asli dalam pemilihan kepala desa langsung, hal ini dijadikan referensi demokrasi modern. Demokrasi di Desa Pandansari terdapat 3 proses pemilihan, yaitu Kepala Desa, Ketua BPD dan Kepala Dusun. Pemilihan kepala desa mencerminkan perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa, baik saat pencalonan maupun pada saat pilihan dari calon yang tampil. Proses pemilihan kepala desa (Pilkades) nuansanya menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan baik calon maupun keluarga besarnya yang ikut mendukung, dan pemilihan kepala desa dengan terpilihnya Ibu Sitin merupakan proses kelanjutan dari kepala desa sebelumnya yaitu suaminya. Jadi proses pilkades tidak sekedar perebutan

kekuasaan dengan tim pemenangnya dalam menyusun strateginya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa. Oleh karena pilkades nuansanya lebih emosional bahkan lebih rasional dibandingkan dengan proses pemilihan lainnya seperti pemilihan legislatif (DPR RI/DPRD), pilihan Bupati/Wali Kota, Pilihan Gubernur, bahkan pilihan presiden sekalipun. Masyarakat desa, dalam menentukan pilihannya mengingankan calon yang wawasan berpikir bagus (intelektualitas memadai), kekayaan ekonomi mencukup (modal untuk mencalon kepala desa cukup banyak, dan ada patungan dari keluarga besarnya, atau ada tuan tanah atau orang kaya desa yang mensponsorinya). Kondisi ini seperti diungkapkan oleh Ibu Saimah pengurus PKK Desa Pandansari, yaitu bahwa:

“Desa Pandansari mempunyai kegiatan yang sangat meriah dan rawan pertengkaran yaitu pemilihan kepala desa secara langsung. Masing-masing calon membentuk tim sukses sebagaimana pemilihan misalnya Bupati, Gubernur dan Presiden. Di antara tim sukses itu ada yang satu keluarga tetapi mendukung calon berbeda. Namun jika diurutkan silsilah keluarga maka mereka para calon itu bisa dikatakan masih satu keluarga yaitu dari garis kakek dan nenek yang bersaudara. Istilah di desa lurah dongkol. Pemilihan desa ini banyak yang diuntungkan, seperti tukang sablon, persewaan sound system, pedagang kecil, asongan, dan tukang ojek. Puncaknya sangat seru saat penghitungan suara, tetapi terasa sangat dewasa para tim sukses, panitia dan masyarakat desa sebagai pemilih. Karena merasa kekeluargaan maka siapapun yang menang tanpa kecurangan, sangat terbuka masyarakat mengikuti hasil penghitungan coblosan. Masyarakat percaya dengan hasil pemilihan, kemudian pada praktek pemerintahan desa masyarakat berpartisipasi mendukung pembangunan desa.” (Wawancara, 27 November 2018)

Dalam proses pilkades ini kelembagaan masyarakat berperan aktif untuk mensosialisasikan calon kepala desa yang akan bertanding, lembaga kemasyarakatan ini disepakati bukan sebagai kendaraan politik para calon, tetapi dijadikan media sosialisasi mengenalkan calon kades tentang program kerjanya maupun hal-hal yang berkaitan dengan pribadi dan kapasitas calon. Forum dengan kelembagaan itu terbuka, ada pertanyaan langsung dari masyarakat dan dijawab langsung oleh calon. Dengan model seperti itu maka masyarakat mengetahui kualitas calon yang akan dipilihnya. Pengakuan dari informan, di samping obyektivitas kualitas calon kades, juga kedekatan hubungan keluarga menjadi faktor penentu yang tidak boleh dikesampingkan. Sebagaimana Haridison (2013:39) dari tulisannya menjelaskan bahwa modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru dalam masyarakat, yakni berupa ketahanan masyarakat yang menggerakkan kebersamaan, mobilitas, saling kepercayaan dan saling mendukung untuk kemajuan bersama, khususnya pembangunan dalam semua aspeknya. Modal sosial pendukung utama stabilitas dan ketahanan masyarakat, permasalahan yang ada di masyarakat disebabkan oleh kerdilnya modal sosial di tengah masyarakat.

Terpilihnya Ibu Sitin yang meneruskan suaminya sebagai kepala desa sebelumnya sudah dapat diperkirakan sebelumnya, tetapi dalam keadaan tersebut bukan tidak ada konflik pasca pilkades. Proses Pilkades ini menimbulkan gap (ketegangan atau konflik) tersembunyi di masyarakat antar pendukung, dan punya pengaruh dalam proses berjalannya

pemerintahan desa terpilih sehingga kepala desa terpilih berupaya untuk mengurangi resistensi konflik berpengaruh terhadap kinerja pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat. Pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah adalah ujung tombak terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga kepala desa terpilih berusaha keras untuk melayani sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan untuk program pembangunan desa, kepala desa mengajak seluruh elemen masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, seperti PKK, Karangtaruna, Jamaah pengajian, tahlilan, diba'an, kelompok tani, paguyuban seni, BPD dan perangkat desa itu sendiri.

Sejalan dengan itu, kerjasama yang harmonis di antara para stakeholder desa pasca Pilkades diupayakan sedemikian rupa oleh kepala desa terpilih, dimana kepala desa mengedepankan unsur *trust* (kepercayaan) sebagai pintu masuk untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Kepercayaan ini ditanamkan sejak kecil oleh keluarga, oleh guru ngaji, guru sekolah, dan dijadikan nilai utama pertimbangan masyarakat desa untuk bertransaksi baik politik, ekonomi, maupun social kemasyarakatan. Di desa dijunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggungjawab sebagai bentuk kepercayaan, oleh karena kepala desa dengan perangkatnya menjalankan pemerintahan desa dengan terbuka, dan ada pertanggungjawabannya (akuntabilitas). Hasil penelitian Saefulrahman (2015:166) juga menjelaskan bahwa kemampuan kepala desa menggali dan mengembangkan modal social menjadi kunci sukses keberhasilan pembangunan desa yang mendukung terciptanya ketahanan masyarakat.

Pada kegiatan lainnya dalam menurunkan ketegangan warga sebab Pilkades itu, para tokoh masyarakat (Modin, Ketua BPD dan Ketua Dusun) dengan ketokohnya ikut meredakan konflik tersebut melalui lembaga kemasyarakatan yang ada, dan hasilnya memuaskan dimana akhirnya masyarakat pendukung calon yang kalah bisa menerima kekalahannya, termasuk calon yang kalah bisa *legowo*, tidak menaruh dendam kepada kepala desa terpilih. Nilai kebersamaan dan kekeluargaan dikembangkan sedemikian rupa sehingga proses politik (demokrasi) desa tidak kontra produktif terhadap pembangunan desa. Terasa sangat dewasa masyarakat desa dalam berdemokrasi.

Tradisi pemilihan kepala desa dengan sejarah desanya serta regulasi pemerintahan yang dibuat memberikan pengaruh meskipun proses pemilihan masih mengutamakan nilai-nilai lokal yang berkembang selama ini. Karakter proses pemilihan kepala desa sesungguhnya dijadikan rujukan untuk pemilihan yang lebih luas, yaitu tingkatan daerah, propinsi dan nasional yang tentu lebih kompleks dan rumit. Yang menarik dalam proses demokrasi desa sebagai kearifan lokal yang berkembang turun-temurun adalah : toleransi, menghormati perbedaan pendapat, kemandirian, saling menghargai dan menghormati, saling mengekang diri dan semangat kebersamaan. Kondisi seperti terpelihara di masyarakat Desa Pandansari pada saat pilkades. Nilai-nilai itu merupakan nilai ideal yang dikembangkan dalam teori demokrasi modern. Lebih dari itu sebagai cerminan demokrasi Pancasila adalah bahwa musyawarah masyarakat desa, baik melalui perwakilan BPD maupun dalam forum-forum desa lainnya menjadi bagian dinamika masyarakat desa Pandansari yang dipelihara

keberlangsungannya. Musyawarah ini dalam keputusan pembangunan desa, menyelesaikan masalah-masalah desa, termasuk konflik akibat pilkades.

Dalam aspek modal sosial, masalah yang berkaitan dengan demokrasi (politik) desa pemerintahan desa dan masyarakatnya memanfaatkan forum atau lembaga yang ada selama ini, seperti kegiatan bersih desa yang diadakan setahun sekali, dalam kegiatan bersih desa ini semua masyarakat dilibatkan setelah dilakukan musyawarah di desa dalam merencanakan kegiatan yang akan diadakan beserta pendanaannya, kemudian diturunkan ke masing-masing dusun untuk dimusyawarahkan ke masing-masing RT. Dengan adanya musyawarah bersih desa ini maka konflik sebab pilkades menurun, kebersamaan dan kemauan mensukseskan kegiatan ini sangat besar. Oleh pemerintah desa diberikan motivasi penghargaan kepada partisipasi terbaik. Kepemimpinan kepala desa dalam akomodasi konflik pilkades berupaya untuk cairnya ketegangan dan mementingkan kegiatan bersama. Sejalan dengan itu, kepala desa bersama perangkat desa berusaha menampilkan kinerja yang baik dan dipertanggungjawabkan secara transparan sehingga kepercayaan masyarakat meningkat dari waktu ke waktu. Untuk menumbuhkan kepercayaan sebagai unsur utama modal sosial, kepala desa memanfaatkan berbagai jejaring social melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, yaitu kelompok pengajian ibu-ibu Fatayat NU, Karangtaruna, PKK, paguyuban kesenian tradisional *Jaran Kepang*, gapoktan, jamaah tahlil bapak-bapak. Dengan kegiatan yang ada dan diadakan secara rutin mingguan maka modal sosial (kepercayaan, kelembagaan dan jaringan) menyatu dalam kehidupan bermasyarakat, dan kondisi ini

menjadikan ketahanan masyarakat desa terjaga, terpelihara dengan baik. Gejolak kecil yang sering timbul di masyarakat, dengan cepat redah melalui kelembagaan atau kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Dalam forum kelembagaan tersebut juga dijaring aspirasi masyarakat untuk dijadikan keputusan (kebijakan) desa, sehingga merasa aspirasinya diperhatikan yang pada gilirannya mereka berpartisipasi dalam pembangunan desanya.

Proses pemilihan kepala desa yang demokratis merupakan cerminan politik asli masyarakat desa Indonesia, dengan itu partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan desa yang menjadi arahan kepala desa terpilih mendapat dukungan sangat besar. Lebih penting lagi dalam proses demokrasi desa ini tidak dikenal oposisi, sebab modal sosial dengan sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang baik mencairkan ketegangan, perbedaan, kecurigaan masyarakat disebabkan oleh proses demokrasi yang sehat.

Ketahanan Sosial Ekonomi

Desa Pandansari sebelum hari Kamis, 13 Februari 2014, adalah wilayah yang sejuk, hijau dan memberikan harapan kemakmuran bagi warganya dengan bertani dan beternak sebagai pekerjaan sebagian besar masyarakat. Namun, tanpa diduga atau diperkirakan sebelumnya, Allah SWT memberikan cobaan masyarakat Desa Pandansari dengan adanya bencana erupsi Gunung Kelud yang membawa banjir lahar dingin. Akibatnya wilayah desa menerima akibat yang paling parah dibandingkan desa lain sekitarnya, yaitu berupa abu tebal, batu-batu kerikil dan lahar dingin itu sendiri. Kerusakan infrastruktur (jalan desa, jembatan dan beberapa bangunan), rumah penduduk tertimbun pasir bahkan ada yang roboh.

Menurut para informan bahwa bencana erupsi Gunung Kelud sama sekali tidak terduga sehingga tidak ada kesiapan masyarakat mengantisipasi, sebab selama ini gunung Kelud meletus, dampaknya ke masyarakat Blitar dan Kediri. Keadaan yang mengagetkan ini menjadikan masyarakat *sok* (kaget) atau putus asa. Meskipun korban jiwa yang ada tidak banyak, yaitu 7 orang (6 orang warga Desa Pandansari) tetapi kerusakan materiil dirasakan sedemikian rupa, termasuk lahan garapan petani (buruh tani) mengalami masalah, keadaan ini berkibat kepada penurunan kegiatan ekonomi pedesaan, hilangnya pekerjaan warga desa, terganggunya kegiatan sosial kemasyarakatan, dan tentu juga melemahnya hubungan dengan desa luarnya disebabkan oleh sarana-prasarana perhubungan dan ekonomi desa terganggu (putus). Jika kondisi ini berkepanjangan maka tentu akan mempengaruhi daerah lainnya. Apabila dampak bencana tidak segera dapat diatasi, kemudian ada desa lainnya atau daerah lainnya terkena bencana maka sudah tentu akan mengusik kepedulian nasional bahkan internasional.

Beberapa perubahan sosial ekonomi yang terjadi pasca erupsi Gunung Kelud tahun 2014 adalah (1). Desa Pandansari sebelum erupsi Gunung Kelud memiliki kondisi alam yang subur. Hal tersebut dapat dilihat pada area persawahan di Desa Pandansari dengan tanah gembur dan hasil dari pertanian yang menunjang kehidupan masyarakat. Mayoritas masyarakat Desa Pandansari menggantungkan hidup pada sektor pertanian. (2). Setelah terjadi erupsi Gunung Kelud, keadaan lingkungan berubah dan aspek kehidupan lainnya yaitu lapangan kerja dan pendidikan. Erupsi Gunung Kelud tahun 2014 ternyata tidak hanya berdampak negatif tetapi juga berpengaruh

positif pada kehidupan masyarakat Desa Pandansari. Salah satu pengaruh positifnya ialah pemilik lahan pertanian khususnya di sekitar aliran Sungai Sambong yang lahanya tertimbun material lahar dingin dijadikan tempat menambang pasir. Pertambangan pasir di Sungai Sambong menjadi profesi pengganti yang menurut informan malah lebih menguntungkan. (3). Pasca erupsi Gunung Kelud tingkat gotong royong masyarakat Desa Pandansari malah mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena orientasi masyarakat pasca erupsi Gunung Kelud selalu mengarah pada aspek finansial, uang, dan bantuan. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari pemberian bantuan yaitu menimbulkan ketergantungan bagi penerimanya. (4). Erupsi Gunung Kelud juga menyebabkan perubahan kebudayaan pada masyarakat Desa Pandansari. Perubahan tersebut di antaranya munculnya tradisi peringatan 1 tahunan erupsi Gunung Kelud yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai wujud syukur terhadap Tuhan karena masih diberikan keselamatan meskipun mengalami bencana. Selain itu, perubahan lainnya yaitu semakin ramai masyarakat yang mengikuti kegiatan tahlilan dan diba'an, dan mulai menguatnya kepercayaan kepada mitos-mitos yang dikaitkan dengan makhluk ghaib.

Menghadapi kondisi seperti itu pemerintah desa bersama masyarakat berusaha dengan memanfaatkan modal sosial untuk membangun kemandirian masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan yang memanfaatkan beberapa kelompok/lembaga yang ada di masyarakat seperti Karangtaruna, PKK, ibu-ibu Fatayat NU, kelompok usaha, serta merintis jaringan kemitraan dengan PT PJB dan Sampoerna, dan adanya website desa yang dimanfaatkan untuk pemasaran produk desa dari hasil pemberdayaan. Sejalan itu, dalam kelompok pengajian, tahlilan,

diba'an, ditanamkan nilai kesabaran, tawakal dan usaha bangkit untuk menjadi lebih baik. Bencana merupakan kehendak Allah SWT sebagai salah satu media *muhasabbah* (evaluasi diri) dan melatih kesabaran serta rasa syukur atas nikmatNya.

Keterlibatan PT PJB (Pembangkit Jawa Bali) merupakan keterpanggilan dengan pola CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan, sebab di Desa Pandansari terdapat waduk Selorejo yang merupakan pusat pembangkit (PLTA) dari PT PJB di samping sebagai destinasi pariwisata, yang pada hari Minggu dan libur banyak didatangi wisatawan lokal maupun regional. Keadaan ini memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar waduk Selorejo, di samping industri rumah tangga berlangsung dengan baik untuk menambah pendapatan keluarga dan warga desa.

CSR atau tanggung jawab perusahaan oleh PT PJB diwujudkan dalam berbagai bentuk bantuan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sitin Kepala Desa Pandansari yaitu bahwa:

“Saya sebagai kepala desa merasa sangat senang dengan adanya program pengembangan desa tangguh bencana dalam meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi bencana, dan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, swasta atau perusahaan maupun masyarakat. Dengan demikian masyarakat Desa Pandansari akan mendapatkan banyak kemanfaatan terutama saat menghadapi bencana, sebab desa kami ini tergolong rawan bencana dari erupsi Gunung Kelud yang pernah terjadi tahun 2014 lalu. Program yang dikembangkan untuk desa tangguh bencana ini adalah penguatan kelembagaan serta meningkatkan pemahaman masyarakat dalam masalah bencana yang kemudian berkembang ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu datang. Sedangkan keterlibatan pihak perusahaan

baik BUMN seperti PT PJB maupun pihak swasta adalah berupa bantuan melalui CSRnya maupun terlibat dalam simulasi lapangan. Dari CSR perusahaan, berupa bantuan materiil untuk perbaikan sarana dan prasarana desa yang rusak akibat erupsi Kelud yang lalu, juga bantuan peralatan untuk siaga dan ketahanan masyarakat terhadap bencana di desa.” (Wawancara, 27 November 2018)

Diakui oleh semua informan bahwa masyarakat mengalami *sok* (kaget) tidak menduga dengan bencana erupsi Gunung Kelud tersebut, muncul trauma dan untuk mengembalikan kepercayaan diri membutuhkan waktu tidak cepat, juga memerlukan dukungan berbagai stakeholder dari berbagai unsur, baik pemerintah, swasta, masyarakat maupun perguruan tinggi dan media. Diperlukan kerja bersama, dan untuk itu pemerintah desa menghimpun berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dalam forum pengembangan ekonomi desa. Sejalan dengan itu, nilai gotong royong, saling membantu, dan kekeluargaan sebagai kearifan lokal dikuatkan kembali dalam proses pemberdayaan untuk dapat keluar dari kesulitan yang dihadapi. Hal ini terdukung hasil penelitian Suandi (2012:280) yang menyimpulkan bahwa modal social, baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap ketahanan masyarakat desa, misalnya ketahanan pangan di pedesaan. Semakin tinggi tingkat modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat maka semakin baik pula tingkat ketahanan pangan berkelanjutan dan pada gilirannya dapat mengentaskan keluarga dari kemiskinan. Modal sosial berupa gotong royong, musyawarah dan interaksi sosial (*silaturahmi*).

Bapak Modin dan Ketua BPD menegaskan bahwa dalam setiap kesempatan di pertemuan

dengan masyarakat selalu ditekankan mempertahankan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, kerjasama menyelesaikan masalah. Jangan melakukan tindakan yang merugikan warga lainnya, seperti mencuri, tidak mudah mengembalikan hutang, dan mulai untuk menjalankan ajaran agama dengan baik. Khususnya Pak Modin mengkhawatirkan tindakan masyarakat yang disebabkan oleh kemiskinan berkembang kekefuran, tindakan merugikan masyarakat. Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam sosial-ekonomi ini, ibu kepala desa bekerjasama dengan PKK Kabupaten dan PT PJB, PT Sampoerna melakukan pemberdayaan dengan berbasis potensi ekonomi desa. Hasil pemberdayaan dilakukan pameran hasil produksi masyarakat Desa Pandansari.

Pihak LSM Jangkar Kelud sebagai pendamping masyarakat terhadap masalah kebencanaan, yaitu Bapak Parno mengatakan:

“Kami dari Jangkar Kelud beraktivitas sebagai pendampingan masyarakat didalam menghadapi masalah bencana sekitar Gunung Kelud, walaupun dalam perkembangannya kami juga memberikan pendampingan untuk masyarakat di luar kawasan Gunung Kelud, misalnya kawasan Gunung Semeru dan Bromo, maupun daerah lain yang berpotensi adanya bencana. Dalam perkembangannya kami menjadi mitra dari BPBD dan organisasi yang bergerak dalam kebencanaan. Khusus untuk masyarakat Desa Pandansari yang dijadikan program desa tangguh bencana (Destana) maka kegiatan yang sangat penting adalah membangun kepercayaan masyarakat untuk bangkit dan mandiri dalam menghadapi bencana setelah erupsi Gunung Kelud yang menjadikan masyarakat trauma. Kejadian yang tiba-tiba itu menjadikan masyarakat ketakutan, sedih dan putus asa. Oleh karena itu dalam kegiatan desa tangguh bencana, kami berusaha memulihkan rasa percaya diri untuk membangun masa depan

lebih baik dari pengalaman menghadapi bencana erupsi tersebut. Meskipun ada korban jiwa yang kecil, tetapi korban harta benda cukup besar termasuk perumahan yang rusak dan ternak sapi dan kebun yang rusak. Memulihkan kepercayaan diri dari trauma memerlukan waktu dan kegiatan yang sistematis dan terarah. Dan dalam setiap kegiatan desa tangguh bencana kami bangun rasa percaya diri, juga saling percaya antara masyarakat. Salah satu yang kami lakukan adalah pertanggungjawaban dan keterbukaan atas bantuan yang diterima untuk masyarakat melalui panitia yang terbentuk, juga kami cepat merespon jika ada persolan yang berkaitan dengan pengembangan desa tangguh bencana di Pandansari ini”. (Wawancara, 28 Januari 2019)

Selain itu kepercayaan akan menimbulkan kemandirian di tiap masing-masing individu, karena dengan adanya kepercayaan masyarakat akan merasa yakin dan mampu dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang mereka alami. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rumaji (Modin Desa Pandansari):

“Selain membangun hubungan yang baik antara masing-masing individu masyarakat dan kelompok, kepercayaan juga modal utama dalam membangun kemandirian dari masing-masing individu tersebut. Karena dengan kepercayaan yang dimiliki akan menimbulkan kepercayaan diri bahwa keadaan atau kondisi yang sedang dialami juga sedang dialami oleh orang lain yang berada di wilayah yang sama dan jumlahnya tidak sedikit. Mereka harus dapat percaya diri dan mampu untuk bangkit dari kondisi tersebut tanpa harus mengharapkan bantuan dari pihak lainnya (donatur ataupun relawan). Yang lebih utama adalah menanamkan bahwa bencana yang telah dijalani bukan sebab Allah SWT menghukum kita, tetapi lebih pada ujian atau cobaan. Hal ini kami lakukan agar masyarakat Desa Pandansari yang mayoritas beragama Islam

memahami bencana dari pandangan agama yaitu Islam, sehingga mereka bersabar dan percaya diri untuk bangkit kembali dan tetap melakukan ibadah dengan baik. Kami memang mengalami trauma dengan kejadian erupsi Gunung Kelud tersebut, dan keadaan tersebut tentu tidak boleh berkepanjangan, sehingga dalam kegiatan desa tangguh bencana kami mengajak tokoh agama dan masyarakat di desa untuk membangkitkn kepercayaan diri kepada masyarakat. Di samping itu untuk bisa membangun ketahanan dalam menghadapi bencana maka rasa saling percaya di antara warga masyarakat juga menjadi bagian penting dalam kegiatan destana ini.”
(Wawancara, 27 November 2018)

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan Desa Tangguh Bencana di Desa Pandansari salah satu materi utama yang disosialisasikan kepada masyarakat adalah nilai-nilai kepercayaan, yakni masyarakat diberikan motivasi untuk bangkit dari trauma saat menghadapi erupsi Gunung Kelud. Di samping itu untuk saling bekerjasama dalam menghadapi ancaman bencana yang sewaktu-waktu datang, di antara warga agar tangguh bencana maka saling percaya sebagai warga desa terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh desa.

Dalam membangun ketahanan masyarakat yang siaga dan tanggap serta tangguh terhadap bencana yang akan berkaibat pada keamanan masyarakat desa di bidang sosial ekonomi maka di Desa Pandansari dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang memiliki visi yaitu *Hangrekso Wargo Pandansari Murih Kalis Ing*, artinya merawat warga Desa Pandansari untuk mengurangi resiko bahaya bencana. Dengan visi ini yang disosialisasikan kepada warga melalui berbagai kelembagaan desa diharapkan

berkembang ketahanan masyarakat desa terhadap masalah bencana yang mungkin terjadi. Sedangkan misi dari FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) tersebut sebagai berikut: (1). Memiliki data penduduk asset kapasitas kerentanan yang selalu update. (2). Sosialisasi ke warga tentang bahaya bencana, yang menyadarkan masyarakat bahwa kita tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) dan bencana bisa terjadi kapan saja. (3). Memahami pengertian ancaman, resiko, kapasitas dan kerentanan sehingga mau melakukan Pengurangan Resiko Bencana (PRB). (4). Memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mampu menyelamatkan diri sendiri dan terampil menolong orang lain. (5). Membangun kebersamaan menuju Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM). (6). Menjadi wadah efektif semua pihak dan lintas bidang atau sektor dalam proses pembangunan. (7). Mengadakan reboisasi.

Dalam mewujudkan visi dan misi dari FPRB tersebut, aktivitas yang dilakukan sebagai berikut: (1). Ikut dalam penyusunan RPJM desa guna pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam pembangunan desa. (2). Melakukan update data kependudukan, asset, kapasitas kerentanan melalui Sistem Informasi Desa (SID) berbasis Wab. (3). Sosialisasi ke warga tentang kebencanaan. (4). Safari PRB ke sekolah atau lembaga pendidikan guna meningkatkan kapasitas anak sebagian dari kelompok rentan. (5). Melakukan pemantapan pengetahuan dan keterampilan para anggota FPRB bersama komunitas penanggulangan bencana. Contohnya: Jangkar Kelud, BPBD, PMI, HM, Sampoerna dan perguruan tinggi. (6). Konsolidasi bersama perwakilan desa yang memiliki komitmen untuk membentuk desa bersaudara karena menyadari adanya

ancaman yang permanen sama yaitu Gunung Api Kelud, setiap kali ada kegiatan kita menghadirkan warga desa tetangga. (7). Ikut bergabung dengan FPRB Jawa Timur yang mempunyai visi yang sama tentang isu bencana.

Semua stakeholder bahu membahu, empati dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa membangkitkan rasa percaya diri untuk tumbuh bangkit atas bencana yang dihadapinya. Mereka mencari kebaikan/hikmah dari musibah yang dialaminya dengan menyandarkan diri pada keimanan (kepercayaan) kepada Allah SWT. Mereka tidak berharap bahwa kemiskinan akibat bencana kemudian berkembang kejahatan di masyarakat, sehingga modal sosial tetap dimiliki masyarakat, terutama kepercayaan baik kepercayaan (keimanan) kepada Allah SWT maupun kepercayaan antar anggota masyarakat. Dengan meningkatkan rasa kepercayaan tersebut maka stabilitas sosial ekonomi masyarakat desa bisa terjaga, dan tentu memberikan kontribusi terwujudnya keamanan secara menyeluruh.

Secara naluri bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan maupun mempertahankan keberlangsungan kehidupan cenderung berkelompok atau tergabung dalam kelembagaan yang ada di masyarakat dimana mereka tinggal. Kelembagaan ini ada sengaja dibentuk, tetapi juga ada sesuai pertumbuhan, perkembangan masyarakat. Lembaga ini mempunyai banyak fungsi di antaranya menyalurkan aspirasi masyarakat atau menjadi bagian dari dinamika masyarakat. Kepercayaan dibentuk dalam setiap masing-masing individu maupun kelompok. Kemudian dalam perkembangan masyarakat kelompok tersebut menguat dan selalu dijadikan tempat rujukan dalam mengambil keputusan atau

tindakan para anggotanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Sitin bahwa:

“Di desa umumnya masih berkembang cara hidup guyup, rukun dan bersama-sama, kemudian kebiasaan tersebut menjadi bagian hidup bermasyarakat yang bertahan bahkan dipertahankan dari generasi ke generasi. Dalam perkembangannya kemudian ada yang menjadi lembaga resmi atau formal, dan yang tetap bertahan dari waktu ke waktu tidak menjadi resmi, ya begitu dari dulu hingga sekarang. Masyarakat desa melibatkan diri dalam kelompok atau lembaga tersebut, misalnya ikut PKK, Pramuka, kelompok dibakkan, kelompok arisan, karang taruna, dan masih banyak lagi kelompok kumpulan warga lainnya, seperti kesenian jaranan, kelompok tani, kelompok peternak, kelompok olah raga. Kami sering menyampaikan program pembangunan lewat kelompok-kelompok tersebut, dan biasanya cukup berhasil. Begitu halnya dengan program desa tangguh bencana ini, dimana masyarakat dengan berbagai kelompok tersebut dihimpun melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)” (Wawancara, 27 November 2018).

Kelompok tersebut diharapkan tetap memiliki peran dalam pengembangan desa tangguh bencana di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Lembaga di sini terbagi menjadi 2 golongan yaitu lembaga formal dan lembaga non formal. Lembaga formal yaitu BPBD, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, sedangkan lembaga non formal seperti karang taruna, ibu-ibu PKK, Mudin, Jangkar Kelud dan masih banyak lagi. Yang mana lembaga-lembaga tersebut tergabung dalam satu forum yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Parno:

“Dalam mewujudkan desa yang tangguh dalam menghadapi bencana, setiap elemen masyarakat maupun perkumpulan-

perkumpulan masyarakat serta lembaga-lembaga pemerintahan hendaknya ikut serta dalam penanganan bencana. Karena dampak dari bencana tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja melainkan seluruh pihak yang berada di wilayah tersebut akan merasakan dampak setelah terjadinya bencana. Oleh sebab itu, untuk mengurangi risiko seluruh masyarakat baik individu maupun kelompok serta lembaga yang memiliki keterkaitan dalam pengembangan desa tangguh bencana di Desa Pandansari harus ikut serta dalam penanganan kebencanaan. Keikutsertaan lembaga formal maupun lembaga non formal tidaklah semata-mata ikut atau masuk dalam perkumpulan, melainkan keberadaan dari tiap-tiap lembaga memiliki peran dan tugas sendiri-diri yang mana dari tugas dan peran tersebut pengembangan desa tangguh bencana di Desa Pandansari dapat terwujud. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut dikumpulkan atau disatukan dalam sebuah forum yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Pandansari.” (Wawancara, 28 Januari 2019)

Proses pengembangan desa tangguh bencana di Desa Pandansari, FPRB atau perkumpulan dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan desa tangguh bencana di Desa Pandansari memiliki tugas untuk memberikan pemahaman tentang bencana, membangun kesadaran masyarakat tentang bencana dan segala hal yang berkenaan tentang bencana dengan tujuan menciptakan masyarakat yang siap dan tangguh dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Proses pengembangan desa tangguh bencana di Desa Pandansari memerlukan jaringan yang luas. Selain hubungan-hubungan yang telah disebutkan di atas, FPRB Desa Pandansari bekerja sama dengan FPRB Jawa Timur dalam proses pengembangan desa tangguh bencana. Bapak Parno menjelaskan bahwa:

“FPRB Desa Pandansari merupakan forum yang baru terbentuk pada tahun 2015 setelah terjadinya bencana alam erupsi Gunung Kelud pada tahun 2014. Masih banyak hal yang harus dipelajari oleh FPRB Desa Pandansari dalam pengembangan desa tangguh bencana di Desa Pandansari. Oleh sebab itu, selain menggandeng lembaga-lembaga yang ada di Desa Pandansari maupun lembaga-lembaga yang berada di luar Desa Pandansari, FPRB Desa Pandansari bekerjasama dengan FPRB Jawa Timur untuk pengembangan desa tangguh bencana di Desa Pandansari.” (Wawancara, 28 Januari 2019)

Jaringan antara masyarakat desa dengan berbagai stakeholder dalam pengembangan desa tangguh bencana merupakan kebutuhan yang mendasar dengan berdasarkan pengalaman saat terjadinya bencana, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sitin, Kepala Desa Pandansari yang menyatakan bahwa:

“Saat terjadi bencana, kami merasakan betapa banyak pihak ikut terlibat menangani bencana di masyarakat, baik itu pemerintah daerah, propinsi maupun pusat dan pihak swasta maupun organisasi kemasyarakatan. Di samping itu, jika melihat bencana di tivi dimana banyak pihak yang ikut mengurus korban, yang saling bahu membahu. Salah satu yang sangat perlu saat bencana adalah jaringan yakni hubungan yang terbangun dalam penanggulangan bencana. Saat bencana kondisi sangat kritis dan keputusan harus diambil dengan cepat, untuk itu maka jaringan yang ada sangat mendukung sebagai bahan informasi mengambil tindakan dan keputusan. Dengan jaringan yang baik maka mudah melakukan koordinasi untuk mengambil tindakan terhadap kondisi lapangan yang sangat cepat perubahan dari waktu ke waktu” (Wawancara, 27 November 2018).

Dengan lembaga-lembaga yang ada dan jaringan-jaringan yang telah dibuat dalam

proses pengembangan desa tangguh bencana di Desa Pandansari menggambarkan nilai yang merupakan cerminan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Pandansari yaitu gotong royong. Kerjasama antar lembaga-lembaga yang terkait dalam pencapaian visi BPBD Kabupaten Malang merupakan bukti gotong royong yang ada terbentuk dengan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Parno:

“Masyarakat Indonesia terkenal dengan gotong royongnya, sehingga tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia untuk saling bahu-membahu dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu, khususnya di masyarakat Desa Pandansari. Dalam proses pengembangan desa tangguh bencana di Desa Pandansari lembaga-lembaga seperti BPBD, FPRB, PJB dan masih banyak lagi bekerjasama untuk menciptakan masyarakat desa yang tangguh dalam menghadapi bencana. Kebersamaan yang dibangun merupakan salah satu contoh dari nilai atau norma yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Saat terjadi bencana maka masyarakat banyak yang empati dengan memberikan bantuan, baik moril maupun materil. Dengan bantuan ini maka masyarakat Desa Pandasari merasa diringankan atas beban yang dihadapinya. Nilai seperti ini terpupuk di masyarakat, dan dalam pengembangan Destana nilai saling membantu, gotong royong dan musyawarah sangat kami tekankan.” (Wawancara, 27 November 2018).

Optimalisasi Peran Modal Sosial Untuk Ketahanan Masyarakat Desa

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas dan keberagaman suku, budaya dan adat-istiadat, yang mana menjadikan Negara Indonesia memiliki kodrat integrasi. Tercipta kodrat integrasi

dilandasi dengan kesadaran kebangsaan dan cita-cita perjuangan yang di bangun melalui gairah dan kehendak yang kuat dari keanekaragaman kehidupan bangsa Indonesia. Keanekaragaman itulah yang membangun kehendak berintegrasi ke dalam suatu kesatuan bangsa, dan bercita-cita membangun satu kehidupan kebangsaan, dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses integrasi berawal dari adanya kesempatan seseorang untuk berhubungan atau berkomunikasi. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat melakukan kontak dengan pikiran orang lain, dan umumnya diakhiri dengan terbentuknya norma-norma kelompok yang baru. Antara dua titik temu itu sudah pasti terdapat aktivitas-aktivitas sosial ekonomi dan budaya lewat kegiatan dimana berlangsung kontak sosial atau interaksi.

Modal sosial merupakan faktor penting dalam menciptakan desa tangguh bencana sebagai modal kuat terbangunnya ketahanan masyarakat, yang mana modal sosial memegang peran penting dalam menciptakan kesiapsiagaan dan ketanggapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam yang terjadi. Dalam hal ini masyarakat (manusia) memiliki peran penting dalam mewujudkan suasana dan kondisi yang diinginkan sebagaimana tujuan dari dibentuknya desa tangguh bencana, karena manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok untuk membentuk sistem sosial, karena manusia memiliki sifat dasar yaitu saling tergantung (membutuhkan) orang lain, membentuk jejaring kerja (*network*) untuk menjalin relasi sosial. Rosida (2014:77) menjelaskan dari hasil penelitian bahwa kemandirian masyarakat berupa partisipasi stakeholder desa untuk meningkatkan peran serta organisasi kepemudaaan dalam mengelola kawasan pasca bencana alam dengan

mengembangkan ekowisata menghasilkan ketahanan masyarakat desa.

Desa Pandansari dalam praktek demokrasi (politik desa) dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dilakukan dengan pengembangan skema-skema modal sosial melalui peran dan fungsi BPD, Karangtaruna, PKK, kelompok keagamaan, Gapoktan, paguyupan seni, kelompok usaha desa. Penguatan modal sosial dilakukan dengan penguatan aspek kepercayaan, jaringan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Tanpa ada kepercayaan maka tidak akan tercipta kerjasama maupun jaringan yang diharapkan. Kepercayaan yang dilandasi ajaran agama sebagai perwujudan sila pertama Pancasila, bahwa faktor kesamaan budaya dan adat istiadat menjadi pemersatu dan alat mencegah radikalisme (kontra ketahanan) antar agama di masyarakat, sehingga keberadaan agama sebagai perekat masyarakat menjadi bagian tidak terpisahkan untuk optimalisasi modal sosial, untuk hal ini dapat memanfaatkan lembaga keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Nilai-nilai kepercayaan dalam masyarakat dapat dilihat dari pertemuan yang cenderung rutin dalam kelembagaan setiap bulannya. Hal tersebut adalah bentuk kepercayaan di antara warga desa yang merupakan elemen modal sosial. Kemudian nilai kepercayaan, solidaritas, jaringan kerjasama tersebut dijadikan modal dalam peningkatan ketahanan masyarakat.

Dalam era globalisasi dimana desa tidak mungkin menutup diri dari pengaruh global akibat kemajuan teknologi informatika dengan nilai-nilai modern-barat yang mengalir tidak terbendungkan. Keadaan seperti ini sangat mungkin menggerus nilai-nilai dan kelembagaan luhur masyarakat desa, bangsa

dan negara yang terakumulasi dalam modal sosial. Apabila tidak ada upaya sistematis, terkoordinasi dan sinergi antar stakeholder maka masyarakat desa akan kehilangan jati dirinya, yang pada akhirnya ketahanan masyarakat desa rapuh, yang berpengaruh untuk kerapuhan ketahanan nasional-bangsa. Oleh karena itu optimalisasi modal sosial dalam gerak dinamika masyarakat desa perlu dirancang dengan baik, sistematis dan terintegrasi melalui kelembagaan formal maupun non-formal yang berkembang di desa dengan program yang manfaat untuk masyarakat desa, dengan dukungan pemerintah daerah dan pusat, di samping keikutsertaan organisasi bisnis dan kemasyarakatan memperkuat pelembagaan modal sosial.

Kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, secara pribadi maupun bersama-sama selalu dilayani oleh organisasi, baik itu organisasi formal maupun non-formal. Oleh karena itu dalam meningkatkan ketahanan masyarakat desa yang menjadi kekuatan utama/inti dari ketahanan nasional maka sebaiknya dimulai dari organisasi atau lembaga yang berkembang di masyarakat dengan mengedepankan modal sosial yang ada dan berkembang sejak masyarakat desa ada. Terlebih pada era otonomi desa sekarang ini dimana masyarakat desa tidak akan mampu menutup diri dari gejala globalisasi dengan nilai-nilai yang dibawahnya. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk meningkatkan ketahanan dirinya agar tidak kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia melalui penguatan modal sosial dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan menguatnya identitas diri maka ketahanan masyarakat bangsa akan ikut kuat, dan hal ini merupakan modal dalam membangun ketahanan nasional.

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, Desa Pandansari pasca terdampak erupsi Gunung Kelud, masyarakatnya mengalami kegoncangan psikologi, kehilangan harta benda dan mata pencaharian sehingga ketahanan masyarakat terganggu. Muncul rasa ketidakpercayaan di antara warga terkena dampak bencana terhadap aparat desa maupun tim relawan kebencanaan. Di samping itu berkembang rasa putus asa di sebagian masyarakat desa.

Kedua, pemerintah desa berkerjasama dengan BPBD dan stakeholder lainnya berusaha membangun ketahanan masyarakat melalui program pengembangan desa tangguh bencana dengan mengintegrasikan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Proses integrasi modal sosial ini berhasil dengan wujud ketahanan masyarakat kembali stabil setelah 3 tahun (2014-2017).

Ketiga, modal sosial yang ada pada masyarakat adalah kepercayaan, kelembagaan masyarakat, nilai atau norma dan jaringan antar warga maupun antar kelembagaan masyarakat yang ada. Di samping itu kepedulian dan komitmen stakeholder desa. Pengusaha dan LSM sangat berperan untuk terintegrasinya modal sosial dalam pengembangan ketahanan masyarakat desa pasca terdampak bencana alam.

Lebih lanjut, disampaikan rekomendasi bahwa pelestarian dan sosialisasi modal sosial yang berkembang di masyarakat perlu dilakukan secara terencana dan sistematis kepada generasi muda pelanjut pemimpin bangsa, terlebih dalam menghadapi pengaruh globalisasi dengan kemajuan teknologi informatika yang cenderung melunturkan nilai-nilai kebangsaan dan kedaerahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan dan Biklen. 1982. *Qualitative Research For An Introduction The Theory And Method*. London.
- Budiono, Bambang, 2000. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Renika, Yogyakarta.
- Haridison, Anyualatha, 2013. *Modal Sosial Dalam Pembangunan, JISPAR Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, ISSN 2089-6123, Juli 2013 Volume 4, Universitas Palangkaraya
- Lemhannas, 1997, *Ketahanan Nasional*, Balai Pustaka-Lemhannas, Jakarta.
- Rahman, Zahidur, 2019. *Pengembangan Desa Tangguh Bencana Oleh BPBD Kabupaten Malang, Skripsi*, Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Rosida, Idah, 2014. *Partisipasi Pemuda Dalam Pengembangan Kawasan Ekowisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat Desa (Studi di Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, *Jurnal Ketahanan Nasional Nomor XX (2) Agustusl 2014* Halaman 68-77
- Saefulrahman, Iyep. 2015. *Kepemimpinan, Modal Sosial, Dan Pembangunan Desa (Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisurepan Kabupaten Garut)*, *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.1* No.1, April 2015, ISSN 2442-5958.
- Suandi, 2012. *Modal Sosial Dan Pembangunan Ketahanan Pangan Berkelanjutan. AGRISEP Vol. 11* No. 2 September 2012 Hal: 270 -281.

Wahana, Heru Dwi, 2015. Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Generasi Millennial Dan Budaya Sekolah Terhadap Ketahanan Individu (Studi Di SMA Negeri 39, Cijantung, Jakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional* , Nomor XXI (1) April 2015 Halaman 14-22.

Wawancara:

Bapak Parno, LSM Jangkar Kelud, Ketua FPRB

Ibu Sitin. Kepala Desa Pandansari

Bapak Rumaji ,Modin Desa Pandansari

Ibu Saimah, Pengurus PKK Desa Pandansari

Bapak Indra, BPBS Kabupaten Malang

Bapak Sarto, Ketua BPD Pandansari